

## Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smk Tamansiswa Medan

Rizki Akmalia<sup>1</sup>, Syafira<sup>2</sup>, Nuria Tri Utami<sup>3</sup>, Desmawati Ramadhani Sianipar<sup>4</sup>,  
Anggi Gusrina Simatupang<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Manajemen Pendidikan Islam, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [rizki.akmalia@gmail.com](mailto:rizki.akmalia@gmail.com)<sup>1</sup>, [syafiraa.5123@gmail.com](mailto:syafiraa.5123@gmail.com)<sup>2</sup>, [nuriatriu@gmail.com](mailto:nuriatriu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[desiisianipar0708@gmail.com](mailto:desiisianipar0708@gmail.com)<sup>4</sup>, [simatupanganggi41@gmail.com](mailto:simatupanganggi41@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan peran komite sekolah ditinjau dari peningkatan mutu pembelajaran menunjukkan bahwa peran peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu dapat dilihat dari segi peningkatan saran dan prasarana di sekolah. Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tak luput dari beberapa perannya tersebut, yang pertama pertimbangan (*advisory agency*), yang kedua sebagai pendukung (*supporting agency*), yang ketiga sebagai pengotrol (*controlling agency*), dan yang keempat sebagai mediator (*executive*) Komite sekolah sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru. Analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Memberikan pertimbangan dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah. Komite sekolah berperan sebagai lembaga penasehat, lembaga pendukung, lembaga pengendali, juga sebagai lembaga mediator. Oleh karena itu, komite sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan pendidikan yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Komite Sekolah Dan Mutu Pendidikan

### Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the school committee's role in terms of improving the quality of learning, showing that the role of school committees in improving the quality of education can be seen in terms of improving the advice and infrastructure in schools. The school committee in improving the quality of education cannot escape these several roles, the first being a consideration (*advisory agency*), the second as a supporter (*supporting agency*), the third as a controller (*controlling agency*), and the fourth as a mediator (*executive*). influential in improving the quality of education. The type of research used is descriptive qualitative, with a phenomenological approach to interpret phenomena that occur where the researcher is an instrument, sampling data sources is carried out by data collection techniques in the form of interviews. Respondents in this study were school principals and teachers. Analysis using descriptive analysis and inferential analysis. The results of the descriptive analysis show that the school committee has several roles that must be carried out for that school. Give consideration in every plan and program prepared by the school. The school committee acts as an advisory body, a supporting agency, a control agency, as well as a mediating institution. Therefore, the school committee must work together with the community and the government to carry out quality education.

**Keywords:** School Committee and Quality of Education

## PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Peran penting pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia diakomodasi pemerintah melalui institusi pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan juga adalah proses pemertabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara non diskriminasi, dinamis, dan intensif.

Pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik. Sebuah upaya untuk meingkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan dan didukung oleh sumber daya pendidikan yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana serta dana yang diadakan dan di dayagunakan oleh pemerintahan, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam membentuk kerjasama. Pembelajaran di sekolah oleh guru harus dilaksanakan dengan baik dan bermutu. Pembelajaran yang bermutu berkorelasi dengan persiapan yang baik. Persiapan tersebut meliputi perencanaan dan pemilihan strategi pembelajaran, sebagaimana dikatakan oleh Jones (2015:99) bahwa keberhasilan dalam pembelajaran sangat tergantung pada efektivitas perencanaan serta seberapa baik menempatkan rencana tersebut ke dalam tindakan. Perencanaan dianggap sebagai kunci pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar secara efektif, menarik, bervariasi, dan progresif. Melalui perencanaan yang baik, guru dapat mengidentifikasi bagaimana siswa belajar dan membuat kemajuan. (*The Qualifications and Curriculum Authority, 2015:2*)

Komite Sekolah merupakan mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai mitra sekolah, komite sekolah harus menjadi badan yang otonom agar memiliki posisi yang sejajar dengan sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga mewadahi partisipasi para stakeholder untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah Keberadaan Komite Sekolah diharapkan tidak menjadi sebuah formalitas semata. Sebagai sebuah badan yang mandiri, Komite Sekolah memiliki komitmen dan loyalitas terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana pendapat dari Sagala (2009:251) yang menyatakan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah maka sebagai realisasi dari peran serta masyarakat di bidang pendidikan diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah wadah yang bernama generik Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari UU tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pemberian otonomi pendidikan yang luas

pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memperdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan.

## **METODE**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara mengumpulkan informasi dan data faktual dari narasumber yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian kualitatif dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Lokasi penelitian dilakukan di dan SMK Taman Siswa Medan Partisipan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru SMK Taman Siswa Medan. Adapun langkah-langkah peneliti menganalisis hasil penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2008:252), dengan menggunakan langkah-langkah berikut: a) Reduksi data, Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dalam hal ini merangkum hasil data penelitian yang didapatkan dari lapangan. b) Verifikasi data, Yaitu menyajikan dan menginterpretasikan data/fakta di lapangan yang telah diolah lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan teoritis dan normatif yang berlaku. c) Display Data, Yaitu sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. d) Menarik kesimpulan, Yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan, dan merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan MBS di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Evaluasi keterlaksanaan peran komite sekolah ditinjau dari peningkatan mutu pembelajaran. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu input dan perencanaan, proses/pelaksanaan, dan hasil/evaluasi. Pada masing-masing tahapan akan dilihat (secara horisontal) kesesuaiannya antara perencanaan dan data hasil implementasi yang diperoleh dari observasi lapangan. Analisis lanjutan untuk mencari kesesuaian antara pelaksanaan program komite sekolah yang diharapkan sesuai standar dengan yang diamati pada masing-masing tahapan.

Kepmendiknas dengan tegas dinyatakan bahwa komite sekolah adalah badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Dalam kepmendiknas nomor 044/U/2002 tersebut ditegaskan bahwa dewan pendidikan di berkedudukan kabupaten atau kota, sedangkan

komite sekolah nerkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun madrasah maupun pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah juga mengemban empat peran sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.
2. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintahan (*executive*) dengan masyarakat disatuan pendidikan.

Agar komite sekolah dapat berperan dengan baik maka dalam pembentukan pengurusan pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan anggota komite dilakukan secara akuntabel bahwa anggota komite bertanggung jawab dalam kinerjanya. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik, artinya nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Komite Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada sebelumnya seperti BP3, dapat memperluas peran, fungsi, dan keanggotaannya atau melebur menjadi organisasi baru yang bernama Komite Sekolah.

Agar peran-peran tersebut dapat berjalan, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan
  - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
  - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
  - 4) Kriteria tenaga kependidikan
  - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
  - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa

Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client model*) dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (*customer*) berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan standar. Rancangan program yang dimaksud dalam hal ini yaitu: konsep, fungsi dan tujuan, serta manfaat komite sekolah. Padahal pemahaman awal tersebut tidak lain merupakan pintu masuk yang merujuk pada bagaimana kontribusi pemangku kepentingan (guru,

kepala sekolah, anggota komite sekolah, dan masyarakat) dalam menyusun dan merencanakan program. Hubungan yang positif antar komponen tersebut juga diharapkan dapat dipupuk agar perencanaan terkait misi kerja komite sekolah tersebut dapat dibangun secara optimal.

Hal ini membuktikan pendapat dari *The Frontier School Board* (2014) bahwa komite sekolah merupakan salah satu pemegang peran esensial yang mendukung berkembangnya tata kelola sekolah, sehingga penting bagi mereka untuk memahami aturan-aturan yang ada serta peran mereka sehingga dapat secara positif bekerjasama menjadi bagian dari kemajuan siswa. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Agar dapat meningkatkan pemahaman setiap anggota komite sekolah terhadap pentingnya membangun rancangan program serta hubungan kerja yang positif adalah dengan sering mengadakan pertemuan/koordinasi antar semua pihak baik guru, kepala sekolah, komite sekolah, wali siswa, dan masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk menyamakan pandangan tentang konsep, peran, fungsi dan manfaat komite sekolah.. Selain itu perlu adanya koordinasi antar *stakeholder* komite sekolah dengan pihak sekolah untuk merencanakan program bersama. Dan Sebaiknya pihak sekolah dengan komite juga melibatkan pemangku kebijakan lainnya seperti pengawas sekolah dan dinas pendidikan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja komite sekolah tersebut.

Matete (2016) bahwa komite sekolah sudah seharusnya memegang peran ikut berkontribusi menyusun rencana pengembangan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, komite sekolah selalu mendorong guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal akademi. Sesuai dengan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan hal ini berujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Peran yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Taman Siswa Medan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan Pendidikan.

## **SIMPULAN**

Setelah melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan SMK Taman Siswa Medan karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Dengan Komite Sekolah sebagai suatu wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah memiliki peran sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency dan mediator agency antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi Komite Sekolah serta manifestasi dari sistem pendidikan yang demokratis, maka Komite Sekolah melakukan akuntabilitas publik secara periodik kepada stakeholder. Dengan demikian, kemajuan, keberhasilan serta kelebihan sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam sarana prasarana pendidikan dapat diketahui dan dinikmati bersama. Hal ini berakibat mereka sebagai pengguna/pelanggan (customer) jasa pendidikan maupun partner akan merasa puas terhadap pelayanan (service) sekolah tersebut. Program yang dilakukan oleh komite sekolah dengan seluruh komponen yang melibatkan pihak sekolah ( kepala sekolah dan guru) dan orang tua siswa, serta lembaga-lembaga luar sekolah maupun masyarakat lainnya belum sempurna, meskipun dilibatkan

dalam rapat rutin komite sekolah setiap akhir semester, Bersama-sama sekolah membuat rumusan visi dan misi sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanafi, Ivan & Mufti Ma'sum. 2015. Analisis Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan. Cakrawala Pendidikan, Februari 2015, Th. XXXIV, No.1
- Kriswantono, M., & Muhyadi, M. 2013. Implementasi Peran Komite Sekolah di SD Negeri Sumberporong 03 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 1(1). Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/2325/192>
- Kemendikbud. 2016. Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jendral pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Mulyono, W., & Pardjono, P. 2014. Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Vokasi, 4(3). Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/2562/2116>
- Kepmendiknas, 2003, SK No. 004/U/2002, tentang acuan pembentukan komite sekolah (Jakarta: Sinar Grafika)
- E.Mulyasa, 2006, manajemen berbasis sekolah, Bandung PT. Remaja Rosada Karya
- Sri Rerani Pantjastuti, komite sekolah, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm 81-83
- Matete, R. 2016. Teaching Professionalism in an Accountability Age in Tanzania. International Journal of Science and Technology Vol.5 No. 2
- Book**
- Panduan Umum Dewan Pendidikan, Ibid., lihat juga dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, hal. 121.
- Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam [http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah\\_bab4.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html).
- Sagala, Syaiful. 2009. Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Michaels. 2009. Handbook for Archdiocesan Catholic School Advisory Boards
- Jones, Keith. 2004. Planning for Mathematics Learning. Routledge.